

WD. 119

Sp. 1233/83  
12/8/83

LEMBAR DISPOSISI

|                                                                         |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Surat dari : KPM TRI BAWUKAWU                                           | Diterima tanggal : 11 Agustus 1983    |
| Tanggal surat : 6 Agustus 1983                                          | Nomor Agenda : 414.38/4349/420.14/903 |
| Nomor Surat : 610/305/475.53/1983                                       | Diteruskan Kepada :                   |
| Perihal : Ketua POLKORWAM<br>PABAT KARYA Jl. Desa<br>Desa Sura Kasekuri | 1. Pamb. Gil<br>2.<br>3. 13/8         |

ISI DISPOSISI

keku. ba  
slaya  
12/8 83

Pam  
ting info  
13/8

Sd. Mr. Hani  
A. Fathor  
14/83  
18/8  
12/83



TEMBUSAN

11/883

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANGKALAN**

Bangkalan, 6 Agustus 1983.

Nomor : 640/303/473.53/1983

Lampiran : -.-

Perihal : Kasus pelaksanaan Padat

Karya jl. Desa Sadah -

Sorpo Kec. G a l i s

-----

K e p a d a -

Yth. Sdr. Gubernur KDH-Tk. I Jawa Timur

cq. Kadit Sos. Pol

di

S U R A B A Y A . -

Sehubungan dengan surat dari Biro Bantuan Hukum " Pro Justitia " tel. 1 Agustus 1983 no.025/Sp/BBH/SBY/1983 hal Mohon keadilan dan mo - hon tindakan tegas terhadap Pelanggar Hukum sehubungan dengan laporan kami tertanggal 30 Juni 1983, yang mana kasus tersebut telah kami laporkan kepada Saudara dengan surat kami tertanggal 2 Juli 1983 nomor 640/262/473.53/1983, maka kami memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Kodes Sadah H.M.Saleh cs belum pernah merampas kohir (tanda bukti hak milik tanah), akan tetapi yang diambil hanyalah Kartu tanda bukti pembayaran Ipeda yang kemudian diganti dengan tanda bukti yang baru.
2. Jalan yang diusulkan untuk proyek padat karya anggaran 1983/1984, adalah jalan yang memang semula dibawah rintisan rakyat sendiri, untuk memudahkan kepentingannya dalam transportasi penjualan batu.
3. Meningat dalam proyek ini pihak rakyat menuntut ganti rugi tanah, sedangkan dana untuk ini tidak tersedia, maka proyek padat karya tersebut tidak direalisasikan dan dibatalkan untuk kemudian dialihkan ke-lokasi lain yang berjarak sekitar  $\pm 0,5$  km dari lokasi semula dan masih termasuk dalam daerah Desa Sadah.  
Dengan demikian masalah keuangan masih tetap ditangan Dep. Na. Ker. - Kab. Bangkalan.
4. Setelah diadakan penelitian terhadap berkas-berkas surat kuasa peng-guat, ternyata tanda tangan maupun cap jempolnya sebagian adalah - palsu.

Demikian



Demikian tanggapan kami terhadap surat dari Biro Bantuan Hukum "Pro Justitia", dengan suatu harapan bisanya Saudara memberikan teguran kepada B.B.H. "Pro Justitia" - Jl. Jendral Basuki Rachmat no. 72 - phone 470772, Surabaya. -

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



TEMBUSAN :

1. Koordid Sospol  
    • eks. Karesidenan Madura.
2. Muspida Kab. Doti II Bangkalan.
3. A r s i p.  
    -----

DISPERPUSIP JATIM